



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2023 ini dapat selesai disusun.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai bagian dari pertanggungjawaban akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kepada masyarakat. LKjIP ini bertujuan untuk menginformasikan capaian keberhasilan kinerja atas sasaran strategis melalui penyusunan capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, laporan ini juga merupakan bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar lebih efektif dan efisien serta berorientasi pada hasil, guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)

Demikianlah Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023 ini disusun, semoga bermanfaat. Masukan dan saran guna peningkatan kinerja maupun peningkatan kualitas dalam penyusunannya sangat diharapkan.

Ketapang, Februari 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan
Kabupaten Ketapang



Ir. Adi Mulia, M.Hut
Nip. 19651009 199203 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. Struktur Organisasi	8
1.2. Tugas dan Fungsi	9
1.3. Isu-Isu Strategis	13
1.4. Keadaan Pegawai.....	16
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	17
1.6. Keuangan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1. Perencanaan Strategis	20
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	23
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023	28
2.4. Instrumen Pendukung.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022	31
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	33
3.3. Realisasi Anggaran.....	78
3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	80
BAB IV PENUTUP	85

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah tahun 2023

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2023	16
Tabel 1.2 Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023	16
Tabel 1.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023	17
Tabel 1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2023	18
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2022-2026	21
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang	22
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023	23
Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menurut Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2023 (Sebelum Perubahan APBD)	29
Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Menurut Sasaran Strategis (setelah APBD Perubahan) Tahun Anggaran 2023	29
Tabel. 3.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026	32
Tabel. 3.2 Capaian Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2023	33
Tabel. 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Setiap Sasaran	34

Tabel. 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	35
Tabel. 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2023	43
Tabel. 3.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan dan Indeks Pemanfaatan”	43
Tabel. 3.7 Indikator Sasaran Strategis Bidang Ketahanan Pangan	43
Tabel. 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bidang Ketahanan Pangan dengan Kabupaten tetangga Tahun 2023.....	49
Tabel. 3.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Setiap Sasaran.....	50
Tabel. 3.10 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	50
Tabel 3.11 Realisasi Kinerja Capaian Produksi Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang.....	51
Tabel. 3.12 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2023.....	53
Tabel. 3.13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap”	54
Tabel. 3.14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap” Tahun 2020-2023	54
Tabel. 3.15 Indikator Sasaran Strategis Bidang Perikanan Tangkap.....	54
Tabel. 3.16 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bidang Perikanan Tangkap dengan Kabupaten tetangga Tahun 2023	56
Tabel. 3.17 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Setiap Sasaran	57
Tabel. 3.18 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	57
Tabel 3.19 Realisasi Kinerja Capaian Produksi Perikanan Budidaya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang	58
Tabel. 3.20 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2023.....	63

Tabel. 3.21 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Jumlah Produksi Perikanan Budidaya”	63
Tabel. 3.22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Jumlah Produksi Perikanan Budidaya” Tahun 2019-2023	68
Tabel. 3.23 Indikator Sasaran Strategis Bidang Perikanan Budidaya	68
Tabel. 3.24 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bidang Perikanan Budidaya dengan Kabupaten tetangga Tahun 2023	70
Tabel. 3.25 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Setiap Sasaran	71
Tabel. 3.26 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	71
Tabel 3.27 Realisasi Kinerja Capaian Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang.....	72
Tabel. 3.28 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan Tahun 2023	75
Tabel. 3.29 Capaian Kinerja “Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat” Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra	76
Tabel. 3.30 Indikator Sasaran Strategis Bidang Perikanan Budidaya	76
Tabel. 3.31 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Produk Perikanan yang Bersertifikat dengan Kabupaten tetangga Tahun 2023	78
Tabel 3.32 Alokasi dan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 20223.....	79
Tabel 3.33 Analisis Efisiensi Anggaran Menurut Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023	80
Tabel 3.34 Daftar Rekomendasi APIP atas Evaluasi dan Review LKjIP Tahun sebelumnya serta Tindak Lanjut Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	13
Gambar 1.2 Kondisi Gedung Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2023	18
Gambar 2.1 Aplikasi Sistem Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2023	30
Gambar 3.1 Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Ketersediaan” Tahun 2019-2023	45
Gambar 3.2 Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Keterjangkauan” Tahun 2019-2023	47
Gambar 3.3 Grafik Capaian Indikator Kerja Utama “Indeks Pemanfaatan” Tahun 2019-2023	48
Gambar 3.4 Grafik “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap”	56
Gambar 3.5 Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama “Jumlah Produksi Perikanan Budidaya” Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2023	70

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati atas kinerja yang telah diperjanjikan dan dicapai dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ketapang serta sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja untuk periode waktu berikutnya.

Dalam laporan kinerja ini disajikan data program dan kegiatan maupun alokasi anggaran per sub kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebagaimana tertuang pada APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023 termasuk perubahan APBD yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang. Namun sebelum menyajikan dan melakukan analisis tentang capaian kinerja pada bab berikutnya terlebih dahulu digambarkan kondisi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang hingga Desember 2023.

1.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang, maka Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas membawahi 1 (satu) Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Ketahanan Pangan;
4. Bidang Perikanan Tangkap;
5. Bidang Perikanan Budidaya; dan
6. UPTD Perikanan Budidaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional yaitu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang.

1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 91 Tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan dan bidang perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas;
- e. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas dilakukan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melalui perangkat organisasinya yang terdiri dari unsur Sekretariat Dinas dan bidang-bidang teknis yaitu:

1.2.1.1. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas sub bagian dan pejabat fungsional selaku koordinator.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas maka sekretariat dinas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan dinas;
- 2) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan dinas;
- 3) Penyelenggaraan urusan kepegawaian dinas;
- 4) Penyelenggaraan urusan keuangan dinas;
- 5) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan dinas;
- 6) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada unit fungsional penyusunan program dan pelaporan, unit fungsional keuangan dan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Sekretaris Dinas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada pejabat fungsional penyusunan program, pengelolaan keuangan, dan kepala sub bagian umum, kepegawaian, perlengkapan, dan evaluasi serta pelaporan dinas.

1.2.1.2. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Pangan serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Ketahanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
- 2) Penyusunan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- 3) Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- 5) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada Bidang Ketahanan Pangan.
- 6) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2.1.3. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang perikanan tangkap mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Tangkap serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Perikanan Tangkap.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang perikanan tangkap menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap;
- 2) Perumusan program dan kegiatan bidang perikanan tangkap;
- 3) Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan tangkap;
- 5) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada Bidang Perikanan Tangkap;
- 6) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan tangkap; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2.1.4. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang perikanan budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Budidaya serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Perikanan Budidaya.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang perikanan budidaya menyelenggarakan fungsi yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;
- 2) Penyusunan program dan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- 3) Penyusunan pedoman pelaksanaan di bidang perikanan budidaya;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- 5) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada Bidang Perikanan budidaya;
- 6) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perikanan budidaya; dan
- 7) Pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2.1.5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya

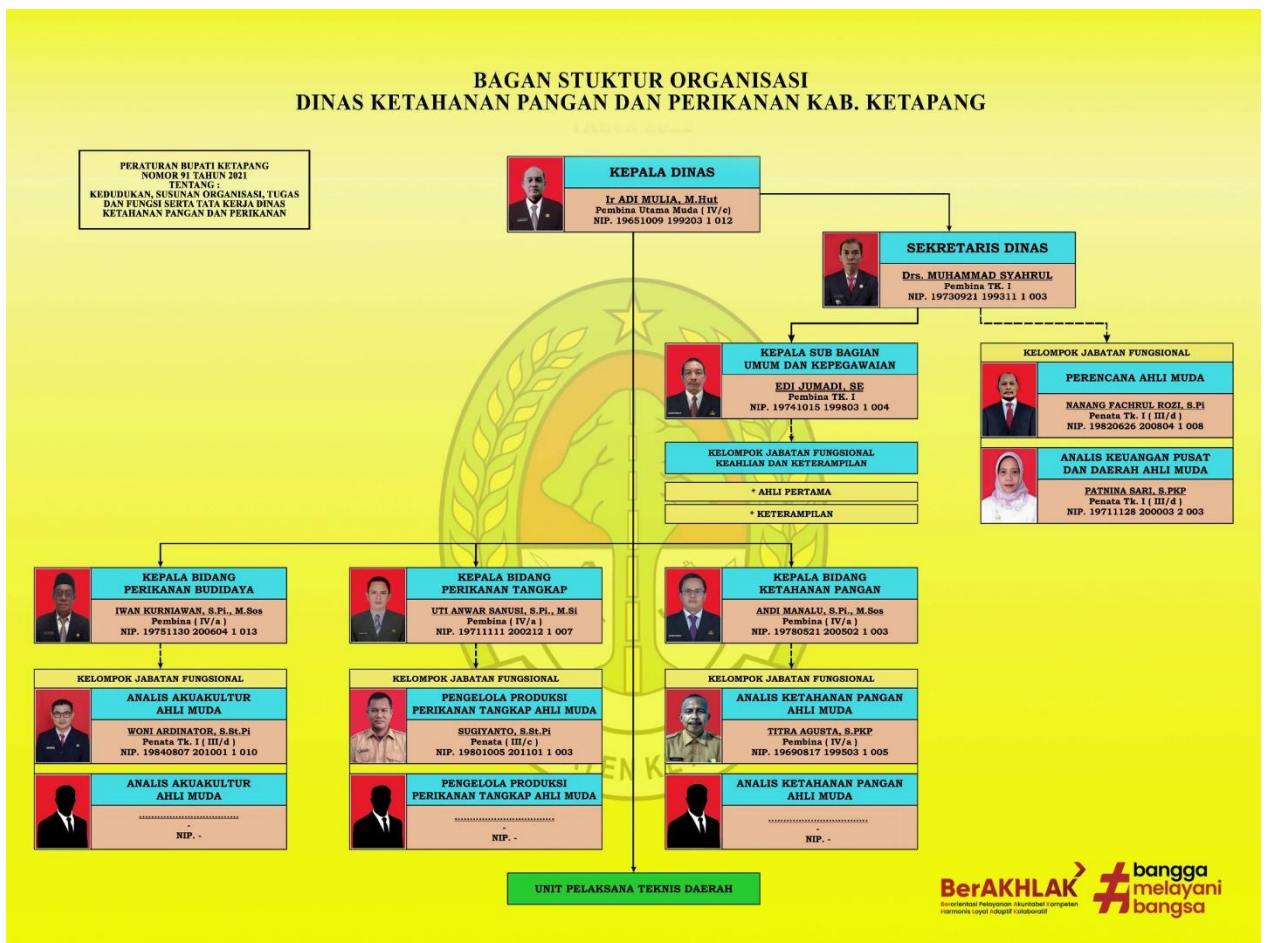
UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, dan membawahi unit Balai Benih Ikan (BBI), Balai Benih Ikan Pantai (BBIP), Unit Pelaksana Perikanan (UPP). UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas. Dalam pelaksanaan tugas teknis, UPTD Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Pengelolaan UPTD Perikanan Budidaya;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan UPTD Perikanan Budidaya; dan
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD.

1.2.1.6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pada gambar berikut ini ditampilkan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang.

Gambar1.1
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



1.3. Isu-Isu Strategis

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sangat dipengaruhi oleh faktor internal organisasi dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, kondisi sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pencapaian kinerja.

Permasalahan yang masih dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya lahan produksi pangan akibat maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi tanaman perkebunan sawit dan kegiatan pertambangan di Kabupaten Ketapang.

2. Masih sulitnya kondisi infrastruktur antar wilayah kecamatan untuk mendukung jalur distribusi pangan di Kabupaten Ketapang sehingga kondisi tersebut berdampak pada kondisi ketahanan pangan dan harga pangan.
3. Belum optimalnya upaya program diversifikasi pangan non nasi, termasuk pengawasan pangan segar asal tumbuhan agar terjamin kualitasnya.
4. Adanya penurunan potensi sumberdaya Ikan akibat gangguan ekosistem air (terumbu karang dan mangrove), kelebihan tangkapan (*overfishing*), penggunaan alat tangkap terlarang (*mini trawl*), penggunaan bahan peledak dan meningkatnya kegiatan industri perkebunan dan pertambangan.
5. Penurunan produksi perikanan di wilayah perairan umum karena beberapa sebab indikatif, seperti kurangnya pengetahuan/kapasitas SDM nelayan, kurangnya peralatan perikanan tangkap yang memadai, belum optimalnya pengawasan di kawasan perikanan tangkap (masyarakat masih ada yang menggunakan racun ikan, setrum), dan belum optimalnya sarana prasarana perikanan tangkap.
6. Belum optimalnya pengolahan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai modal dasar dalam percepatan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh terbatasnya jaringan prasarana, terbatasnya akses permodalan, kurangnya penyuluhan, tingginya fluktuasi harga pasar, dan terbatasnya prasarana industri pengolahan hasil ikan.
7. Keamanan pangan produk hasil pengolahan ikan yang kurang memenuhi persyaratan mutu yaitu bebas dari bahan tambahan yang dilarang seperti formalin.
8. Sulitnya nelayan perikanan tangkap/perairan umum untuk mendapatkan BBM Solar Bersubsidi yang disediakan Pemerintah sehingga berpengaruh kepada frekuensi aktivitas penangkapan ikan di laut dan hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil produksi perikanan tangkap sepanjang tahun.

Dari berbagai permasalahan pada sektor ketahanan pangan dan perikanan yang dihadapi, tantangan dan potensi mendasari perumusan isu-isu strategis bidang ketahanan pangan dan perikanan.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kontribusi dari potensi sumber daya alam yang cukup besar di sektor pangan padahal dengan luasnya lahan pertanian seharusnya dapat meningkatkan produksi dan cadangan pangan daerah yang kemudian dapat meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Ketapang.
2. Belum optimalnya kontribusi sumberdaya dari sektor perikanan cukup besar dengan potensi sumber daya lahan dan luas perairan yang menjadi kewenangan daerah terhadap perekonomian daerah di Kabupaten Ketapang.
3. Tingginya potensi alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan dan pertambangan sehingga berpengaruh pada produksi pangan dan kurangnya lahan untuk perikanan budidaya.
4. Perlunya pengembangan sentra produksi pangan yang terpadu dari berbagai sektor (pengembangan agropolitan) untuk mendukung ketahanan pangan daerah

1.4. Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak (Non PNS) hingga akhir Desember tahun 2023 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebanyak **96 orang** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2023

No.	Jabatan	Jumlah	%
1	Eselon II.b	1	1,04
2	Eselon III.a	1	1,04
3	Eselon III.b	3	3,12
4	Eselon IV.a	2	2,08
5	Eselon IV.b	1	1,04
6	Fungsional Tertentu	9	9,37
7	Non Eselon / Staf PNS	18	18,75
9	PPPK	2	2,08
10	Sub Total PNS	37	38,54
11	Staf Non PNS	59	61,46
Total		96	100

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Berdasarkan tabel tersebut di atas, pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan hanya **38,54 %**, selebihnya yaitu sebesar **61,46 %** berstatus sebagai tenaga Non PNS atau tenaga kontrak.

Tabel 1.2

Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
A	ASN / PPPK		
1	SLTA	9	24,32
2	D-III	1	2,70
3	S-1 / D4	22	59,46
4	S-2	5	13,51
Sub Total		37	100
A	NON ASN		
1	SD	7	11,86
2	SLTP	2	3,39
3	SLTA	21	35,59
4	D-III	13	22,03
5	S-1 / D4	16	27,12
6	S-2	0	0
Sub Total		59	100
Total		96	

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Tingkat Pendidikan PNS pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan tabel tersebut di atas sebesar 24,32% masih tingkat SLTA ke bawah, kemudian 59,46% Pendidikan strata-1 dan 13,51% strata-2. Pendidikan tenaga Non PNS dari 59 orang proporsi Pendidikan dengan tingkat SLTA ke bawah masih sebesar 50,84%.

Pada tabel di bawah ini juga ditampilkan distribusi pegawai berdasarkan golongan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3
Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan
pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023

No.	Golongan	Jumlah	%
1	Golongan IV	8	21,62
2	Golongan III	24	64,86
3	Golongan II	5	13,51
Total		37	100,00

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kondisi ketenagaan hingga akhir Desember 2023 belum memadai, terutama untuk tenaga-tenaga teknis fungsional di bidang ketahanan pangan, teknologi hasil pertanian, tenaga teknis perikanan, tenaga teknis di bidang keuangan, teknologi informasi (IT) dan tenaga administrasi keuangan/akuntansi masih sangat dibutuhkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat berjalan lebih optimal.

1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang hingga akhir tahun 2023 masih belum memadai. Kondisi ruangan gedung Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai layanan publik masih layak namun perlu dilakukan **rehabilitasi ruangan seperti ruang untuk konsultasi, ruang untuk ibu menyusui, ruangan untuk rapat yang memadai, dan rehabilitasi kamar mandi/wc untuk umum, kemudian perbaikan jalan lingkungan dan halaman kantor, penataan taman kantor dan pembangunan prasarana parkir kendaraan serta rehab atap dan pengecatan gedung rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.**

Pemenuhan kebutuhan prasarana peralatan kerja seperti Televisi, Notebook/PC, Printer, Kamera, Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan masih sangat diperlukan. Berikut ini adalah kondisi gedung Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang hingga Desember 2023.

Gambar 1.2
Kondisi Gedung Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang Tahun 2023



Gambaran lebih rinci terkait ketersediaan sarana prasarana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan hingga akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Keadaan Sarana dan Prasarana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang Tahun 2023

No	Nama Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Kantor Dinas	1 Unit	Rusak Ringan
2	Gedung UPTD Perikanan Budidaya	1 Unit	Rusak Ringan
3	Balai Benih Ikan (BBI)	2 Unit	Rusak Sedang
4	Panti Benih	1 Unit	Rusak Ringan
5	BBIP Kendawangan	1 Unit	Rusak Ringan
6	Pos UPP	12 Unit	Rusak Ringan
7	Pos Penyuluh	3 Unit	Rusak Ringan
8	Pos Kesehatan Ikan	1 Unit	Rusak Ringan
9	Kolam Ikan Percontohan	1 Buah	Rusak Ringan
10	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	4 Unit	2 Rusak Berat, 1 Rusak Ringan, 1 baik
11	Kendaraan Dinas Roda 2	32 Unit	Baik

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

1.6 Keuangan

Anggaran untuk belanja program dan kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang dan DAK sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang tentang Penjabaran APBD yang dirinci dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan perubahan anggaran (DPA/DPPA).

Alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada tahun anggaran 2023 sebelum perubahan adalah sebesar **Rp.13.849.108.043,-** dan setelah perubahan APBD bertambah menjadi **Rp.16.717.654.730,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.14.047.435.476,-** atau **84,03%**. Total anggaran tersebut sudah termasuk untuk belanja pegawai termasuk untuk belanja pembayaran honorarium pegawai Non PNS pada masing-masing bidang/unit kerja.

Alokasi anggaran yang tersedia masih belum memadai atau mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di bidang ketahanan pangan, perikanan tangkap dan perairan umum serta perikanan budidaya termasuk untuk kegiatan pembinaan dan peningkatan mutu pengolahan hasil perikanan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Visi Misi Kepala Daerah

Perencanaan kinerja dan penganggaran berbagai program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran strategis tahun anggaran 2023 merupakan **Tahun ke-2 (kedua)** dari periode Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah yaitu *"Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera"*. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan dan perikanan adalah dalam rangka mewujudkan Misi Kepala Daerah yang ke-1 (satu) yaitu *"Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik"* dan Misi ke-5 (kelima) yaitu *"Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat"*.

Merujuk pada misi tersebut di atas, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kedaulatan pangan dengan terjaminnya ketahanan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal. Kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor perikanan tangkap dan perairan umum, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 melalui misi ke-1 (satu) yaitu *"Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik"* dan misi ke-5 (lima) yaitu *"Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat"*, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam jangka menengah beserta indikator kinerjanya akan diwujudkan melalui

pelaksanaan berbagai program dan kegiatan prioritas sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2022, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kedaulatan Pangan	-	Indeks Ketahanan Pangan	76,8	78,56	80,32	82,08	83,84
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketersediaan	86,73	87,64	87,96	88,84	88,97
			Indeks Keterjangkauan	82,32	83,43	83,85	84,74	84,87
			Indeks Pemanfaatan	61,43	62,44	62,56	63,44	63,88
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan	-	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan	0,41	0,83	2,07	3,62	4,53
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	24.428,05	26.648,78	28.869,52	31.090,24	33.310,98
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	20.787,93	22.866,73	25.153,40	27.668,74	30.435,61
		Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat	11%	11%	12%	12%	12%
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang Akuntabel dan Menopang Pelayanan Publik	-	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	56 (CC)	60,01 (B)	62 (B)	66 (B)	70 (BB)
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	12 (C)	17 (C)	20 (CC)	21,8 (B)	23 (B)

Sumber data Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2021 – 2026

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka ditetapkan upaya-upaya melalui penetapan strategi dan arah kebijakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang

VISI	: Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera		
MISI 1	: Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang akuntabel dan menopang pelayanan publik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Peningkatan Kelembagaan Berbasis Kinerja	Peningkatan ketersediaan dan kualitas data kinerja
			Pelaksanaan, Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
			Pelaksanaan pemerintahan dengan Akuntabel, Handal dan Terpercaya
			Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah
			Peningkatan kompetensi manajerial, teknis, dan fungsional
			Peningkatan sistem pelayanan publik daerah
			Peningkatan sistem pengadaan barang dan jasa
MISI 5	: Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kedaulatan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Peningkatan ketersediaan pangan	Peningkatan stok cadangan pangan
			Pengembangan food estate sebagai pusat pangan daerah
		Peningkatan akses distribusi pangan	Peningkatan lumbung pangan dan sarana pendukungnya
			Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung distribusi pangan
Peningkatan konsumsi pangan alternatif	Pengembangan toko tani		
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Peningkatan diversifikasi pangan non-nasi
			Peningkatan pengetahuan / kapasitas SDM nelayan
			Peningkatan peralatan perikanan tangkap
			Peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Penurunan penggunaan racun ikan dan setrum di kawasan perikanan tangkap
			Peningkatan pengetahuan / kapasitas SDM pelaku pembudidaya
			Peningkatan jangkauan distribusi benih ikan budidaya
			Peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya
	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Peningkatan nilai tambah produk perikanan	Penurunan penggunaan keramba yang berlebihan di kawasan sungai
			Peningkatan Penjaminan Mutu dalam pengolahan ikan segar
			Optimalisasi perikanan berbasis teknologi

sumber data Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2021 – 2026

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan lembar dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah sebagai pemberi amanah kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini, akan terwujud komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dengan Kepala Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023

Perjangkin Kepala Dinas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketersediaan	87,64
		Indeks keterjangkauan	83,43
		Indeks pemanfaatan	62,44
2	Meningkatnya perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	26.648,78 ton
3	Meningkatnya produksi perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	22.866,73 ton
4	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat	11%
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada DKPP		17 (C)
No.	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.373.672.822,-	APBD
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp 344.500.000,-	APBD
3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 828.854.250,-	APBD
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 315.815.000,-	APBD
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 194.226.995,-	APBD
6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 3.003.428.238,-	APBD
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 4.316.269.425,-	APBD
8	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 336.888.000,-	APBD
Total		Rp 16.717.654.730,-	

Sumber data KOKITA 2023

Perjanjian Kinerja Sekretaris

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya sistem Kelembagaan Berbasis Kinerja	Nilai Sakip Perangkat daerah	69,84 Angka
2.	Meningkatnya sistem Kelembagaan Berbasis Kinerja	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi	100 Persentase
3.	Meningkatnya sistem Kelembagaan Berbasis Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,75 Angka
4.	Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan evaluasi kinerja	Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai standar	90 Persen
5.	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan serta tersusunnya laporan keuangan	Persentase terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan serta tersusunnya laporan keuangan sesuai standar	100 Persentase
6.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pengelolaan aset sesuai ketentuan yang berlaku	91 Persentase
7.	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persentase
8.	Meningkatnya kelengkapan Barang perangkat daerah	Persentase peningkatan kelengkapan barang perangkat daerah	75 Persentase
9.	Meningkatnya pelayanan umum perkantoran	Persentase Kelancaran Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100 Persentase
10.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase Barang milik daerah yang terpelihara	70 Persentase
	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7.373.672.822	
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 264.289.233	
3.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 6.127.611.966	
4.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 42.200.000	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 361.800.000	

Sumber data KOKITA 2023

Perjanjian Kinerja Bidang Ketahanan Pangan

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya lumbung pangan dan prasarana yang sesuai standar	Persentase Peningkatan Lumbung Pangan dan Sarana Pendukungnya	1,9 Persen
2.	Meningkatnya tempat penyimpanan pangan	Persentase tempat penyimpanan pangan yang tersedia	1,5 Persentase
3.	Meningkatnya Diversifikasi Pangan dan Konsumsi Pangan	Persentase Peningkatan Stok Cadangan Pangan	1,5 Persen
4.	Meningkatnya Diversifikasi Pangan dan Konsumsi Pangan	Persentase toko tani yang berkembang	87,45 Persen
5.	Meningkatnya Diversifikasi Pangan dan Konsumsi Pangan	Persentase Peningkatan diversifikasi pangan non-nasi	75 Persen
6.	Meningkatnya kualitas informasi ketersediaan dan harga pangan yang akurat	Persentase dokumen informasi ketersediaan dan harga pangan yang akurat	100 Persen
7.	Meningkatnya kualitas informasi ketersediaan dan harga pangan yang akurat	Persentase Peningkatan Kelembagaan dan distribusi pangan	10 Persen
8.	Meningkatnya kualitas informasi ketersediaan dan harga pangan yang akurat	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman (B2SA)	100 Persen
9.	Meningkatnya pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan	Persentase pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan yang terlaksana	100 Persen
10.	Meningkatnya ketersediaan energi dan protein perkapita	Persentase data target konsumsi pangan yang akurat	100 Persen
11.	Menurunnya desa rawan pangan	Persentase Penurunan Desa Rawan Pangan	2,3 Persen
12.	Pemutakhiran peta PSVA	Persentase dokumen peta FSVA yang tersedia	85 Persen
13.	Meningkatkan Koordinasi Penanganan kerawanan pangan	Persentase koordinasi penanganan daerah rawan pangan	100 Persen
14.	Menurunnya produk pangan yang mengandung zat kimia diluar ambang batas	Persentase produk pangan yang terbebas dari zat kimia diluar ambang batas	85 Persen
15.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan	85 Persen

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Rp. 344.500.000	
2.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 344.500.000	
3.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp. 828.854.250	
4.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp. 109.950.900	
5.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp. 523.504.000	
6.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp. 195.399.350	
7.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp. 315.815.000	
8.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Rp. 10.615.000	
9.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 305.200.000	
10.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp. 194.226.995	
11.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 194.226.995	

Sumber data KOKITA 2023

Perjanjian Kinerja Bidang Perikanan Tangkap

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap	Persentase Nelayan Yang Terlatih	20 Persen
2.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan peralatan perikanan tangkap	20 Persen
3.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap	20 Persen
4.	Meningkatnya penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Persentase Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	18 Persen
5.	meningkatnya kapasitas nelayan kecil	Persentase Kelompok Nelayan yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Persen

6.	Meningkatnya Kapasitas TPI	Persentase TPI yang dibangun dan sesuai standar	20 Persen
7.	Meningkatnya Jumlah Kapal yang memiliki tanda daftar	Persentase Kapal Yang Telah Memiliki Tanda Daftar	100 Persen
Program/Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp. 3.007.428.238	
2.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.144.225.038	
3.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 122.950.000	
4.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp. 677.050.000	
5.	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 63.203.200	

Sumber data KOKITA 2023

Perjanjian Kinerja Bidang Perikanan Budidaya

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pembudidaya perikanan	Persentase Pelaku Pembudidaya Ikan Yang Terlatih	70 Persen
2.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pembudidaya perikanan	Persentase peningkatan jangkauan distribusi benih ikan budidaya	15 Persen
3.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pembudidaya perikanan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Budidaya	15 Persen
4.	Meningkatnya Kapasitas Pembudidaya Ikan	Persentase Kelompok Pembudidaya yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Persen
5.	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan UPR	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya	10 Persen
6.	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan UPR	Persentase UPR yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 Persen
7.	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Olahan Ikan	Persentase Lembaga Penjamin Mutu Pengolahan Ikan yang Berkembang	80 Persen

8.	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Olahan Ikan	Persentase nelayan yang menggunakan teknologi perikanan tangkap tepat guna	60 Persen
9.	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Olahan Ikan	Persentase Pembudidaya Ikan Yang Menggunakan Teknologi Perikanan Budidaya Tepat Guna	60 Persen
10.	Meningkatnya Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Persentase usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil yang meningkat kapasitasnya	60 Persen
11.	Tersedianya dan tersaluranya bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Persentase Tersedianya dan tersaluranya bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) kabupaten/kota	60 Persen
Program/Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp. 4.316.269.425	
2.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp. 74.320.000	
3.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp. 4.241.949.425	
4.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp. 336.888.000	
5.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Rp. 70.000.000	
6.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 266.888.000	

Sumber data KOKITA 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran. Penetapan indikator kinerja pada saat perencanaan kinerja akan mampu meningkatkan kualitas perencanaan. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023

2.3.1. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang dialokasikan pada 5 (lima) sasaran

strategis. Rincian alokasi anggaran per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
menurut Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2023 (Sebelum Perubahan APBD)

No	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Rp. 1.218.069.450,-
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Rp. 1.870.428.238,-
3	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Rp. 3.966.269.425,-
4	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Rp. 336.888.000,-
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Rp. 6.457.452.930,-
Jumlah		Rp.13.849.108.043,-

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Setelah APBD Perubahan, alokasi anggaran untuk belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang mengalami peningkatan baik untuk belanja program prioritas dan program penunjang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Jumlah anggaran untuk belanja program prioritas dan untuk program penunjang adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Rincian alokasi anggaran menurut sasaran strategis setelah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Menurut Sasaran Strategis (setelah APBD Perubahan) Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Rp. 1.683.396.245,-
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Rp. 3.007.428.238,-
3	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Rp 4.316.269.425,-
4	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Rp. 336.888.000,-
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Rp. 7373672822,-
Jumlah		Rp. 16.717.654.730,-

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

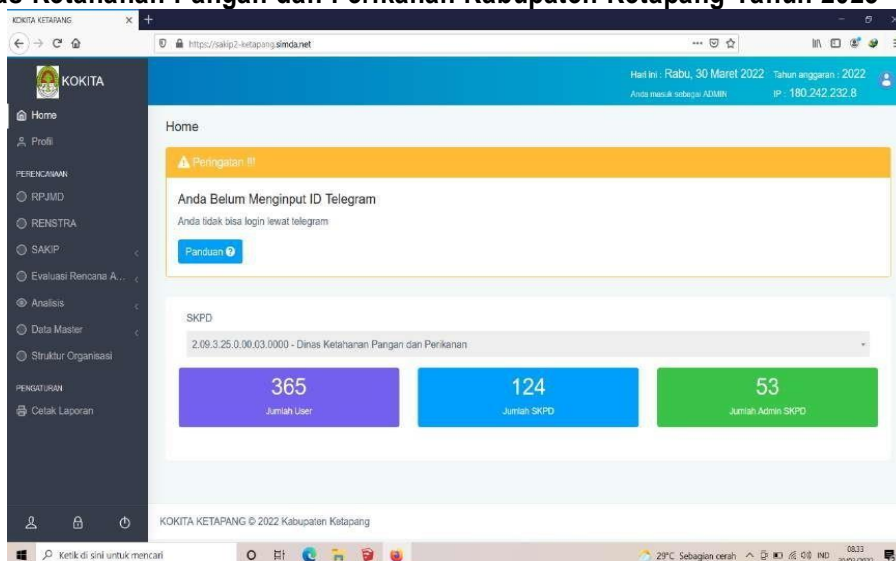
Jika dibandingkan alokasi anggaran dalam rangka mencapai sasaran strategis sebelum perubahan dengan setelah perubahan APBD, maka peningkatan anggaran yang signifikan adalah untuk mendukung sasaran strategis *“Meningkatnya ketahanan pangan, Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan Meningkatnya produksi perikanan budidaya”*, sementara untuk mendukung sasaran strategis *“Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan”* justru mengalami penurunan setelah APBD Perubahan. Terkait dengan hal ini maka pada tahun anggaran 2024, Program dan Kegiatan untuk mendukung meningkatnya kualitas produksi perikanan harus tetap menjadi prioritas.

2.4 Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung dalam melakukan pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selama tahun 2023 sudah mulai menerapkan teknologi informasi dengan nama aplikasi **“KOKITA”** yang disediakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Adapun tahapan pengukuran kinerja dimulai dengan Penetapan Perjanjian Kinerja, Penyusunan Rencana Aksi Kinerja setelah DPA ditetapkan. Kemudian dilakukan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja serta Evaluasi Rencana Kerja (Evaluasi Renja) setiap triwulan. Sistem tersebut adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1

Aplikasi Sistem Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023 (Renstra 2021-2026)

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja utama daripada sasaran strategis. Perhitungan pencapaian sasaran, memperhatikan karakteristik indikator, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja semakin buruk, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Memperhatikan karakteristik seluruh indikator kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang, maka sifat indikatornya termasuk dalam kategori yang bersifat positif, yaitu **semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik.**

Tabel. 3.1
Target Kinerja Sasaran Strategis Jangka Menengah
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketersediaan	Hasil Perhitungan Kementerian Pertanian/Badan Pangan Nasional	84,78	86,73	87,64	87,96	88,84	88,97
		Indeks keterjangkauan	Hasil Perhitungan Kementerian Pertanian/Badan Pangan Nasional	81,80	82,32	83,43	83,85	84,74	84,87
		Indeks pemanfaatan	Hasil Perhitungan Kementerian Pertanian/Badan Pangan Nasional	60,19	61,43	62,44	62,56	63,44	63,88
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dalam 1 Tahun (Ton)	23.365,54	24.428,05	26.648,78	28.869,52	31.090,24	33.310,98
3	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dalam 1 Tahun (Ton)	21.316,90	20.787,93	22.866,73	25.153,40	27.668,74	30.435,61
4	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat	Jlh Produk Olahan Perikanan yg Bersertifikat dibagi Total Olahan Perikanan di kali 100%	10%	11%	11%	12%	12%	12%
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada DKPP	Nilai Reformasi Birokrasi DKPP	Hasil Penilaian Tim Review RB Kabupaten	3,48 (D)	12 (C)	17 (C)	20 (CC)	21,8 (B)	23 (B)

Sumber data Rentra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2021 – 2026

Pada Tabel Target Kinerja Sasaran Strategis jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021-2026 bahwa Rumus Formulasi Perhitungan yang digunakan pada sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan sudah disesuaikan dengan hasil perhitungan Badan Pangan Nasional, untuk sasaran strategis meningkatnya produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya masing - masing menggunakan formulasi perhitungan jumlah produksi perikanan tangkap dalam 1 tahun dan jumlah produksi perikanan budidaya dalam 1 tahun, untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas produksi perikanan sudah disesuaikan dengan jumlah produk olahan perikanan yang bersertifikat dibagi total olahan perikanan dikali 100%.

Tabel. 3.2
Capaian Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketersediaan	Angka	87,64	83,27	95,01
		Indeks keterjangkauan	Angka	83,43	84,64	101,45
		Indeks pemanfaatan	Angka	62,44	64,04	102,56
	Indeks Ketahanan Pangan		Angka	78,56	75,99	96,73
2	Meningkatnya produksi perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	26.648,78	28.139,90	105,60
3	Meningkatnya produksi perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	22.866,73	16.676,16	73
4	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat	%	11%	10,23%	93

Sumber data Bapanas 2024 dan Statistik Perikanan 2023

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah dalam rangka mendukung untuk mewujudkan Misi Kepala Daerah yang ke-5 (lima) yaitu “Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat” dan ke-1 (satu) yaitu “Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik”, melalui penetapan 3 (tiga) tujuan yaitu:

1. Meningkatkan kedaulatan pangan ;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan; dan
3. Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang Akuntabel dan Menopang Pelayanan Publik.

Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut di atas telah ditetapkan melalui pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya ketahanan pangan;
2. Meningkatnya produksi perikanan tangkap;
3. Meningkatnya produksi perikanan budidaya;
4. Meningkatnya kualitas produksi perikanan; dan
5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Untuk mencapai masing-masing sasaran strategis tersebut di atas, pada tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan 7 (tujuh) program utama dan 1 (satu) Program Penunjang yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3.2.1 Sasaran ke 1 Meningkatnya Ketahanan Pangan

Tabel. 3.3

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Setiap Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Rumus)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketersediaan	Hasil Perhitungan Badan Pangan Nasional setiap tahun terhadap bobot rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah.
		Indeks Keterjangkauan	Hasil Perhitungan Badan Pangan Nasional setiap tahun terhadap 3 indikator sesuai bobot masing - masing
		Indeks Pemanfaatan	Hasil Perhitungan Badan Pangan Nasional setiap tahun terhadap 5 indikator turunan indeks Pemanfaatan sesuai Bobot masing - masing

Sumber data SK Indikator Kinerja Utama 2023

Tabel. 3.4

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Indikator Sasaran	Baseline Tahun ke-n (2022)	Tahun n+1 (2023) ?			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2026 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Ketersediaan	86,73	87,64	83,27	95,01	88,97	93,59
2	Indeks Keterjangkauan	82,32	83,43	84,64	101,45	84,87	99,73
3	Indeks Pemanfaatan	61,43	62,44	64,04	102,56	63,88	100,25

Sumber data Bapanas 2024

Untuk mendukung pencapaian Indeks Ketersediaan berikut program dan kegiatannya

- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
 - Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan;
 - Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota.

Untuk mendukung pencapaian Indeks Keterjangkauan berikut program dan kegiatannya

- Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
 - Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Untuk mendukung pencapaian Indeks Pemanfaatan berikut program dan kegiatannya

- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Data pendukung realisasi kinerja untuk sasaran 1 yaitu meningkatnya ketahanan pangan daerah sebagai berikut :

Perhitungan Indeks Ketahanan Pangan berdasarkan Data Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang disusun pada tingkat Kabupaten. Adapun indikator yang tercakup didalamnya yaitu rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa, rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga, rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa, desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai, rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa, dan rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa yang selanjutnya disusun dalam bentuk peta FSVA. Hasil analisis dikirim dan diolah lebih lanjut oleh Badan Pangan Nasional. Perhitungan Indeks Ketahanan Pangan adalah olahan dari Badan Pangan Nasional berdasarkan data dari peta FSVA.

Foto Kegiatan



Rapat Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2023



Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal



Promosi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal



Penyerahan Bantuan Benih untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan



B2SA Goes To School Edukasi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman



Pemeriksaan Kualitas Beras Kegiatan Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah



Penandatanganan Dokumen Kelengkapan Pengadaan Cadangan Beras



Inventarisasi data pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dalam rangka pengawasan keamanan pangan dan registrasi perizinan PSAT-PDUK



Pengujian Keamanan Pangan Kegiatan Pegawai Keamanan Pangan



Penyerahan Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang ke Lokasi Bencana



Pembangunan Infrastruktur Lantai Jemur



Pembangunan Infrastruktur Lumbung Pangan

Tabel. 3.5
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Bidang Ketahanan Pangan
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketersediaan	Angka	87,64	83,27	95,01
		Indeks Keterjangkauan	Angka	83,43	84,64	101,45
		Indeks Pemanfaatan	Angka	62,44	64,04	102,56

Sumber data Bapanas 2024

Tabel. 3.6
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan dan Indeks Pemanfaatan”

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Baseline 2022	2023			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketersediaan	86,73	87,64	83,27	95,01	88,97	93,59
		Indeks Keterjangkauan	82,32	83,43	84,64	101,45	84,87	99,73
		Indeks Pemanfaatan	61,43	62,44	64,04	102,56	63,88	100,25

Sumber data Bapanas 2024

Berdasarkan Tabel diatas untuk Indikator Kinerja Utama Bidang Ketahanan Pangan Belum Bisa diperbandingkan dikarenakan ketiga Indikator tersebut belum mendapat rilis data dari Badan Pangan Nasional 2023.

Tabel. 3.7
Indikator Sasaran Strategis Bidang Ketahanan Pangan

No	Rumusan Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Indeks Ketahanan Pangan					
1	Target	76,80	78,56	80,32	82,08	83,84
2	Realisasi	74,41	75,99	-	-	-

Sumber data Bapanas 2024

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten Ketapang

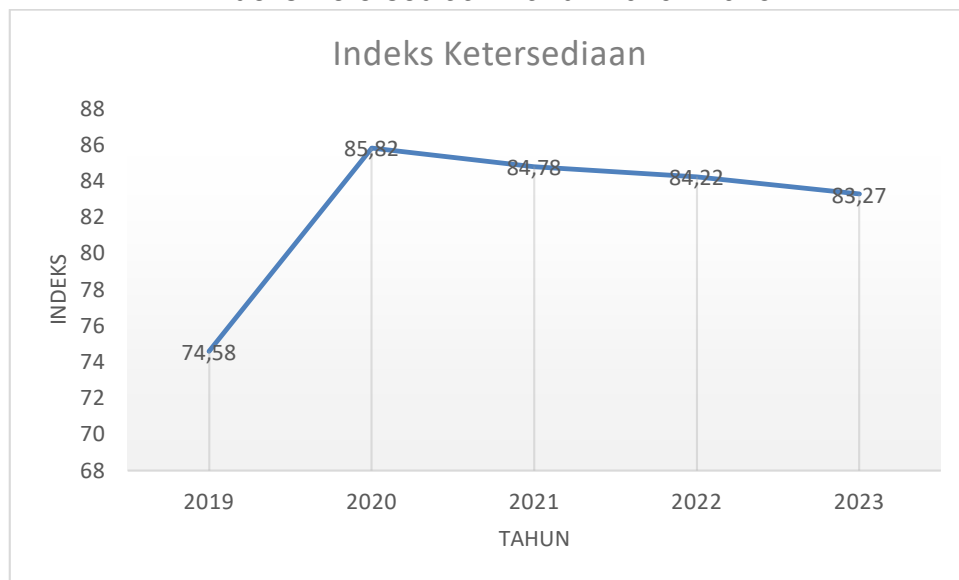
- Belum terpenuhinya anggaran untuk pengadaan cadangan pangan sesuai ketentuan yang berlaku. Cadangan pangan yang dimaksud disini adalah beras sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 16 Tahun 2019 dimana cadangan beras pemerintah daerah minimal 100 ton;
- Luas lahan pertanian (sawah) yang mengalami penurunan mempengaruhi kapasitas produksi pertanian dari tahun ke tahun;
- Keterbatasan sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga dimana semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga desa diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam, bergizi seimbang dan aman dengan memanfaatkan sumber pangan lokal;
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengolahan produk pasca panen terutama pangan lokal sebagai upaya ketersediaan cadangan pangan non beras;
- Belum optimalnya produksi hasil pertanian masyarakat khususnya padi akibat adanya gagal panen karena hama dan faktor perubahan cuaca ekstrim sehingga berdampak kepada stok cadangan pangan pada lumbung pangan masyarakat;
- Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur pendukung ketersediaan dan distribusi pangan.

Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan Indeks Ketersediaan sesuai faktor-faktor penentunya adalah

- Mengusulkan anggaran untuk pengadaan cadangan pangan sesuai dengan kebutuhan atau target yang telah ditetapkan melalui APBD Kabupaten Ketapang
- Melakukan koordinasi untuk pengaturan pembatasan alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan atau kegiatan lainnya terutama bagi daerah yang sangat potensial untuk lahan pertanian termasuk untuk pengembangan sentra produksi pangan/food estate yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah
- Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam upaya pengembangan sarana prasarana penyedia pangan di daerah terpencil
- Melakukan sosialisasi, promosi, edukasi Pola Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman dengan memanfaatkan Sumber Daya Lokal

- Melakukan pelatihan dan penyediaan teknologi pengolahan pangan pasca panen dalam rangka pengembangan produk pangan lokal sebagai cadangan pangan non beras
- Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar dapat melakukan upaya-upaya peningkatan produksi pertanian baik melalui intensifikasi atau ekstensifikasi khususnya padi pada wilayah- wilayah yang sangat potensial
- Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pemanfaatan bantuan infrastruktur pendukung cadangan dan distribusi pangan.

Gambar 3.1 Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Ketersediaan Tahun 2019 - 2023



Berdasarkan Gambar 3.1 Belum dapat diperbandingkan karena Indeks Ketersediaan Pangan Tahun 2023 belum di rilis oleh Badan Pangan Nasional

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan Indeks Keterjangkauan Pangan Kabupaten Ketapang

- Masih tingginya persentase penduduk miskin di Kabupaten Ketapang. Hingga akhir tahun 2023 data dari BPS Kabupaten Ketapang menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Ketapang masih sebesar 9,25% menurun 0,14% poin pada Maret 2022. Tetapi posisi kemiskinan Kabupaten Ketapang masih masuk dalam kelompok 3 tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Landak.
- Masih rendahnya tingkat pendapatan per kapita rata-rata keluarga karena keterbatasan lapangan pekerjaan dan banyaknya proporsi penduduk dalam

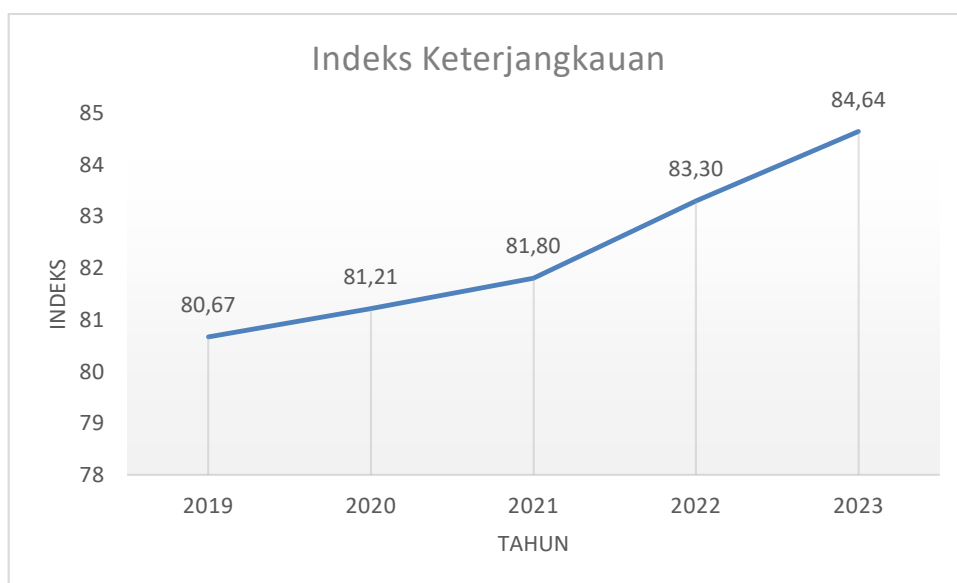
usia angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan sehingga berpengaruh kepada tingkat pengeluaran keluarga untuk konsumsi pangan yang harus dikeluarkan atau dibelanjakan untuk kebutuhan pangan keluarga.

- Terbatasnya ketersediaan jaringan listrik di beberapa wilayah di Kabupaten Ketapang, mempengaruhi aktivitas pekerjaan yang berdampak kepada kegiatan ekonomi masyarakat termasuk terhadap penyimpanan bahan pangan khususnya bahan pangan yang tidak tahan lama. (harus disimpan di tempat khusus seperti lemari pendingin).

Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan Indeks Keterjangkauan sesuai faktor-faktor penentunya adalah

- Melaksanakan koordinasi kepada stakeholder dalam rangka menyusun program penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
- Melaksanakan koordinasi dan upaya peningkatan pendapatan keluarga sesuai kewenangan masing-masing pihak.
- Melaksanakan koordinasi kepada pihak terkait untuk mendorong peningkatan kualitas layanan ketersediaan jaringan listrik terutama kepada wilayah-wilayah atau desa yang belum tersedia jaringan listrik selama 24 jam secara terus menerus.
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis dan agroundustri, serta lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai ke tingkat pedesaan.
- Meningkatkan koordinasi dan sinergitas yang baik antar Perangkat Daerah, terhadap peningkatan dan/atau perbaikan infrastruktur.
- Mendorong pengembangan pelabuhan secara terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya dalam melayani kawasan perkotaan dan pedesaan.

Gambar 3.2 Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Keterjangkauan Tahun 2019 - 2023



Berdasarkan Gambar 3.2 Belum dapat diperbandingkan karena Indeks Keterjangkauan Pangan Tahun 2023 belum di rilis oleh Badan Pangan Nasional

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan Indeks Pemanfaatan Pangan Kabupaten Ketapang

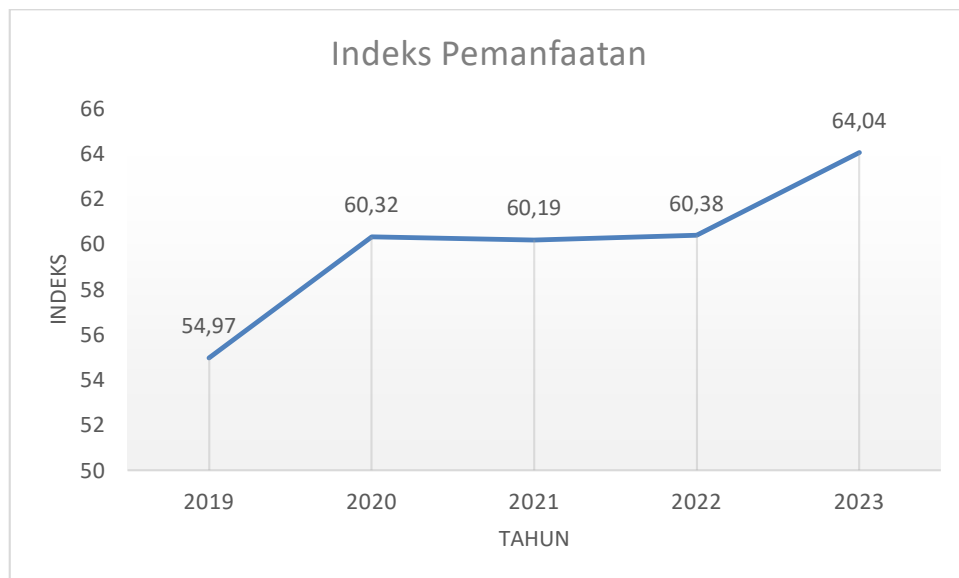
- Masih belum optimalnya cakupan air bersih yang memenuhi syarat bagi rumah tangga di Kabupaten Ketapang.
- Belum optimalnya pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun dan Pendidikan vokasi termasuk kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis tentang pangan dan gizi seimbang
- Belum meratanya distribusi tenaga Kesehatan di Kabupaten Ketapang terutama di daerah-daerah terpencil yang aksesnya sulit di beberapa kecamatan
- Masih adanya desa-desa stunting yang perlu intervensi program secara terpadu sesuai kewenangan masing-masing pihak.
- Belum tercakupnya pengawasan keamanan pangan di seluruh kecamatan Kabupaten Ketapang

Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan Indeks Pemanfaatan sesuai faktor-faktor penentunya adalah

- Melaksanakan koordinasi kepada OPD terkait untuk melakukan upaya peningkatan cakupan akses air bersih termasuk jaringan PDAM kepada masyarakat terutama wilayah-wilayah yang cakupannya rendah.

- Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan Upaya Program Penuntasan wajib belajar 9 tahun termasuk Program Paket A, B dan C dan Pendidikan Vokasi bagi masyarakat yang belum tuntas wajar 9 tahun.
- Melakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan pemerataan distribusi dan penambahan tenaga Kesehatan di wilayah yang tenaga kesehatannya sangat terbatas.
- Melakukan koordinasi dengan seluruh OPD terkait serta mengusulkan anggaran untuk kegiatan sesuai kewenangan dalam rangka penanggulangan stunting di Kabupaten Ketapang.
- Mengusulkan penambahan anggaran dalam rangka penyediaan sarana prasarana pengujian keamanan pangan dan peningkatan kapasitas SDM kelembagaan keamanan pangan.

Gambar 3.3 Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pemanfaatan Tahun 2019 - 2023



Berdasarkan Gambar 3.3 Belum dapat diperbandingkan karena Indeks Pemanfaatan Pangan Tahun 2023 belum di rilis oleh Badan Pangan Nasional

Tabel. 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Bidang Ketahanan Pangan dengan Kabupaten tetangga
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Ketapang	Kayong Utara	Kubu Raya	Provinsi
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketersediaan	83,27	90,67	72,46	76,18
		Indeks Keterjangkauan	84,64	84,23	90,17	86,31
		Indeks Pemanfaatan	64,04	57,00	49,55	59,08

Sumber data Bapanas 2024

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan Tahun 2023 Terhadap Kabupaten Kayong Utara dan Kubu Raya menunjukkan Indeks Ketersediaan Kabupaten Ketapang lebih rendah dibandingkan Kayong Utara, namun lebih tinggi dibandingkan dengan Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan oleh Indikator hasil pemetaan FSVA yaitu rasio luas sawah terhadap jumlah penduduk di Kayong Utara lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Ketapang. Indeks Keterjangkauan Kabupaten Ketapang lebih tinggi dari pada Kayong Utara namun tidak lebih tinggi dari Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan oleh belum terjangkaunya Gerakan Pangan Murah hingga ke seluruh pelosok Kecamatan di Kabupaten Ketapang dan sarana penyedia pangan di daerah terpencil masih sangat terbatas. Sementara Indeks Pemanfaatan Kabupaten Ketapang lebih tinggi dibandingkan dengan Kayong Utara, Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan oleh perbaikan pola perbaikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman serta kesadaran pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat Kabupaten Ketapang. Untuk capaian angka Nasional tidak tersedia pada buku Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 yang dirilis oleh Badan Pangan Nasional. Hal ini karena perhitungan indeks ketahanan pangan yang didalamnya terkandung indeks ketersediaan, indeks keterjangkauan, indeks pemanfaatan hanya membandingkan pencapaian ketahanan pangan antar provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan cut off point IKP.

3.2.2 Sasaran ke -2: “Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap”

Tabel. 3.9

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Setiap Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Rumus)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Total jumlah Produksi Perikanan Tangkap termasuk produksi perikanan dari wilayah perairan umum (sungai)dalam 1 Tahun dibagi Target Tahunan x 100%

Sumber data SK Indikator Kinerja Utama 2023

Tabel. 3.10

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Indikator Sasaran	Baseline Tahun Ke-n	Tahun n + 1			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2026 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	25.730	26.648,78	28.139,90	105,60%	33.311	77,24%

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Bidang Perikanan Tangkap Terdapat 1 (satu) Program dan 4 (empat) Kegiatan diantaranya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan kegiatan diantaranya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Penerbitan

Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan data perhitungan Realisasi Kinerja pada Sasaran 2 dapat dilihat pada table dibawah ini

**Tabel 3.11 Realisasi Kinerja Capaian Produksi Perikanan Tangkap
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang**

No	KABUPATEN	KECAMATAN	Realisasi		Jumlah
			Laut	Umum	
1	KETAPANG				
		1. Kendawangan	6.436,00	15,21	6451,21
		2. Manis Mata	-	315,60	315,60
		3. Marau	-	1,59	1,59
		4. Singkup	-	3,7	3,75
		5. Air Upas	-	-	-
		6. Jelai Hulu	-	7,60	7,60
		7. Tumbang Titi	-	7,15	7,15
		8. Sungai Melayu Rayak	-	4,96	4,96
		9. Pemahan	-	2,15	2,15
		10. Matan Hilir Selatan	4.226,00	254,51	4.480,51
		11. Benua Kayong	3.712,40	89,76	3.802,16
		12. Matan Hilir Utara	3.610,00	27,41	3637,41
		13. Delta Pawan	5.364,00	131,28	5495,28
		14. Muara Pawan	3.414,00	235,03	3649,03
		15. Nanga Tayap	-	73,65	73,65
		16. Sandai	-	95,68	95,68
		17. Hulu Sungai	-	37,08	37,08
		18. Sungai Laur	-	39,00	39,00
		19. Simpang Hulu	-	19,44	19,44
		20. Simpang Dua	-	16,65	16,65
		Jumlah	26.762	1.377	28.139,90

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2023

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa penghasil produksi terbanyak yaitu dari perairan laut sebesar 26.762 ton sedangkan untuk perairan umum jumlah produksinya 1.377 ton setelah dijumlahkan menjadi 28.139,90 Ton. Untuk Produksi Perikanan Tangkap dari target yang di tetapkan sebesar 26.648,78 ton dapat melebihi target dengan capaian kinerja 105,60%.

Foto Dokumentasi

**Pembangunan Steigher/Tambahan Perahu Nelayan
di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023**



**Pembangunan Rambat Beton Menuju, Steigher Tambahan Perahu Nelayan di Desa Suka Baru
Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023**



**Pengadaan Coolbox TPI Rangga Sentap Kecamatan Delta Pawan
Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023**



Tabel. 3.12
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Bidang Perikanan Tangkap
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	26.648,78	28.139,90	105,60

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2023

Capaian kinerja untuk sasaran ke-2 (dua) yaitu “Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap” dengan indikator kinerja yaitu “Jumlah produksi perikanan tangkap”, tahun 2023 adalah sebesar **28.139,90** ton dari target sebesar **26.648,78** ton atau **105,60%**.

Tabel. 3.13
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap”

N	Indikator Sasaran Strategis	Baseline o 2022	2023			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	25.730	26.648,78	28.139,90	105,60%	33.311	77,24%

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2023

Capaian kinerja untuk *jumlah produksi perikanan tangkap* tahun 2023 *sudah mencapai target*, kemudian hasil produksi dari tahun 2020-2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hasil ini berbanding lurus dengan potensi perikanan tangkap yang besar di Kabupaten Ketapang termasuk di wilayah perairan umum pada daerah aliran Sungai Pawan dan Sungai Pesaguan sebagaimana ditampilkan pada tabel dan gambar berikutini.

Tabel. 3.14
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
“Jumlah Produksi Perikanan Tangkap” Tahun 2020-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator or Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun											
			2020			2021			2022			2023		
			Targ et	Realis asi	%	Targ et	Realis asi	%	Target	Realis asi	%	Target	Realis asi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	23.767	22.257	93,65	24.243	23.366	96,38	24.428,05	25.730	105,33	26.648,78	28.139,90	105,60

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2023

Tabel. 3.15
Indikator Sasaran Strategis Bidang Perikanan Tangkap

No	Rumusan Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap					
1	Target	24.428,05	26.648,78	28.869,52	31.090,24	33.310,98
2	Realisasi	25.730	28.139,90	-	-	-

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2023

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap adalah:

1. Masih kurangnya anggaran untuk pengadaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan untuk kelompok-kelompok nelayan di Kabupaten Ketapang termasuk sarana pendukung untuk kegiatan penangkapan ikan seperti kapal motor dan mesin.
2. Terbukanya lapangan pekerjaan di sektor perkebunan dan pertambangan sehingga para nelayan cenderung beralih profesi menjadi pekerja perkebunan karena penerimaan hasil pekerja sektor perkebunan lebih cepat dibandingkan menjadi nelayan.
3. Masih terjadinya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penyetruman di wilayah perairan umum (sungai).
4. Masih lemahnya kelengkapan administrasi perizinan kapal nelayan sehingga berpengaruh kepada ketentuan pemberian subsidi seperti BBM Solar dan hal ini berpengaruh pada aktivitas melaut para nelayan.
5. Sulitnya nelayan mendapatkan BBM Solar Bersubsidi pada waktu-waktu tertentu sehingga frekuensi kegiatan melaut untuk menangkap ikan menjadi kurang.
6. Belum optimalnya fungsi layanan TPI sesuai ketentuan yang berlaku.

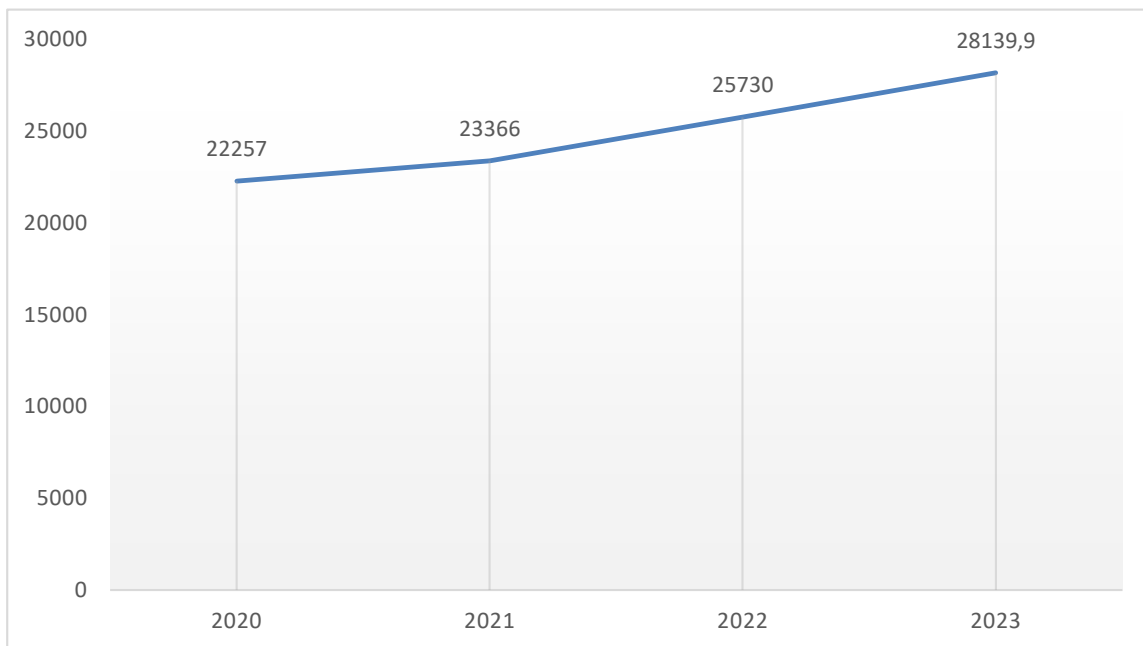
Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan

Produksi Perikanan Tangkap adalah:

1. Pengadaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan dan alat bantu penangkapan ikan bagi nelayan melalui DAK dan APBD Kabupaten Ketapang.
2. Memberikan bantuan, pendampingan dan penyuluhan tentang penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan untuk menjaga sumber daya perikanan agar tetap terjaga.
3. Membangun sarana prasarana penangkapan ikan seperti steigher untuk kapal nelayan, dan perbaikan layanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
4. Pembenahan administrasi perizinan kapal nelayan agar tidak menimbulkan masalah dalam aktivitas untuk menangkap ikan di laut.
5. Peningkatan mutu pelayanan untuk pemberian Rekomendasi BBM bersubsidi untuk nelayan sehingga aktivitas melaut untuk menangkap ikan berjalan dengan lancar.

6. Melaksanakan koordinasi dengan aparat untuk pengawasan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti menggunakan racun dan penyetruman sesuai kewenangan kabupaten.
7. Memberikan informasi terkait waktu kondisi cuaca ekstrim kepada nelayan agar dapat berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk mendapatkan informasi *real time* tentang prakiraan cuaca sehingga meningkatkan efisiensi dari aktivitas penangkapan ikan di laut.

Gambar 3.4
Grafik “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap”



Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2023

Tabel. 3.16
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bidang Perikanan Tangkap dengan Kabupaten tetangga Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Ketapang	Kayong Utara	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	28.139,90	21.735	393.958,60	2.901.565

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2023

Kemudian untuk jumlah produksi perikanan tangkap, Kabupaten Ketapang di atas Kabupaten Kayong Utara dikarenakan Luas wilayah perairan umum Kabupaten Ketapang lebih Besar dibandingkan dengan luas wilayah perairan umum di

Kabupaten Kayong Utara, dan untuk perbandingan jumlah produksi Provinsi maupun Nasional sudah tentu Kabupaten Ketapang dibawah Provinsi maupun Nasional.

3.2.3 Sasaran ke -3: “Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya”

Tabel. 3.17

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Setiap Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Rumus)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Total Produksi Perikanan Budidaya dalam 1 Tahun dibagi dengan Target Tahunan x 100%

Sumber data SK Indikator Kinerja Utama 2023

Tabel. 3.18

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Indikator Sasaran	Baseline Tahun Ke-n	Tahun n + 1			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2026 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	20.787,93	22.866,73	16.676,16	73%	30.435,61	55%

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Bidang Perikanan Budidaya Terdapat 1 (satu) Program dan 2 (dua) Kegiatan diantaranya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, sedangkan kegiatan yang mendukung diantaranya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

Sedangkan data perhitungan Realisasi Kinerja pada Sasaran 3 dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 3.19 Realisasi Kinerja Capaian Produksi Perikanan Budidaya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang

Tabel		Produksi Perikanan Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Ketapang (Ton), 2023						
Table		Production of Fish Capture by Subdistrict in Ketapang Regency, 2023						
		Budidaya	Tambak	Kolam		Jaring		
Kecamatan		Laut	Brackist	Fresh	Keramba	Apung	Sawah	Jumlah
Subdistric		Marine	Water	Water	Cage	Floating	Paddy	Total
		Culture	Pond	Pond		Cage Net	Field	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kendawangan	-	7.391,00	1.068,00	-	-	-	8.459,00
2	Manis Mata	-	-	601,10	-	-	-	601,10
3	Marau	-	-	102,00	-	-	-	102,00
4	Singkup	-	-	86,00	-	-	-	86,00
5	Air Upas	-	-	98,00	-	-	-	98,00
6	Jelai Hulu	-	-	182,00	-	-	-	182,00
7	Tumbang Titi	-	-	171,60	-	-	-	171,60
8	Pemahan	-	-	805,00	-	-	-	805,00
9	Sungai Melayu Rayak	-	-	120,30	-	-	-	120,30
10	Matan Hilir Selatan	-	1.030,82	50,00	-	-	-	1.080,82
11	Benua Kayong	-	-	1.110,00	-	-	-	1.110,00
12	Matan Hilir Utara	-	108,00	60,00	-	-	-	168,00
13	Delta Pawan	-	-	955,78	92,68	-	-	1.048,46
14	Muara Pawan	-	-	640,19	-	-	-	640,19
15	Nanga Tayap	-	-	771,27	-	-	-	771,27
16	Sandai	-	-	391,10	-	-	-	391,10
17	Hulu Sungai	-	-	371,20	-	-	-	371,20
18	Sungai Laur	-	-	171,60	-	-	-	171,60
19	Simpang Hulu	-	-	130,42	-	-	-	130,42
20	Simpang Dua	-	-	168,10	-	-	-	168,10
Jumlah / Total		2023	-	8.529,82	8.053,66	92,68	-	16.676,16

Sumber / Source : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2023

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa penghasil produksi terbanyak yaitu dari Budidaya Tambak sebesar 8.529,82 ton sedangkan untuk Budidaya Kolam jumlah produksinya 8.053,66 ton dan untuk budidaya Keramba sebesar 92,68 ton setelah dijumlahkan menjadi 16.676,16 Ton. Untuk Produksi Perikanan Budidaya dari target yang ditetapkan sebesar 22.866,73 ton dengan capaian kinerja 73%.

Foto Dokumentasi

Pengadaan Calon Induk Ikan Mas, Ikan Nila dan Ikan Lele untuk Panti Benih Mulia Baru dan BBI Sandai



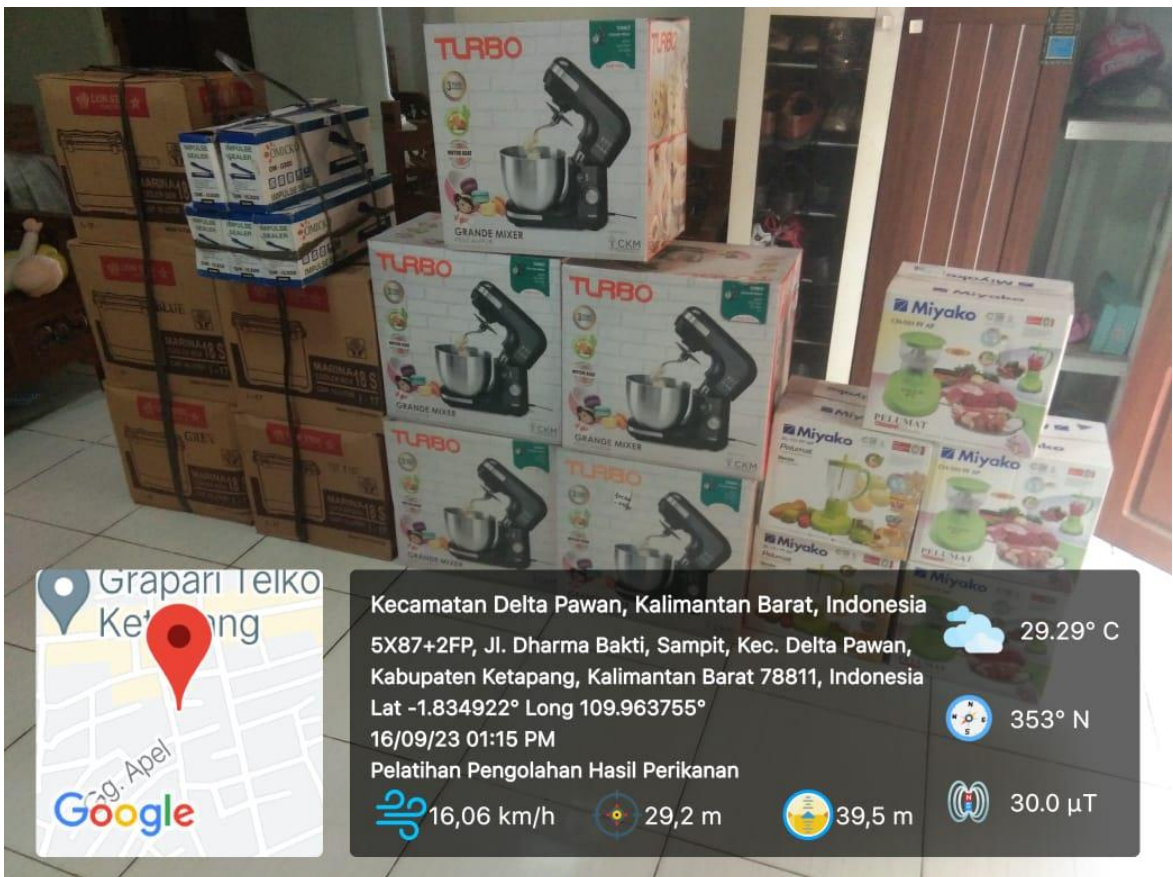
Pengadaan Pakan Ikan Panti Benih Mulia Baru, BBI Sandai, BBI Manjau dan Kawasan Agro Forestry Kab. Ketapang



Restocking Bibit Ikan Air Tawar di Aliran Sungai Pesaguan Kec. Matan Hilir Selatan



Pengadaan Alat Pengolah Ikan Lanjutan di Kabupaten Ketapang



Rehabilitasi Rumah Olahan Perikanan Kelompok Mega Bersaudara



Pengadaan Freezer untuk Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan di Kabupaten Ketapang



Tabel. 3.20
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Bidang Perikanan Budidaya
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	22.866,73	16.676,16	73%

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2023

Sementara capaian kinerja untuk sasaran ke-3 (tiga) “**Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya**” dengan indikator “**Jumlah produksi perikanan budidaya**” hanya tercapai sebesar **16.676,16 ton** dari target sebesar **22.866,73 ton**. Dengan demikian tingkat capaian kinerjanya hanya 73%.

Tabel. 3.21
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Jumlah Produksi Perikanan Budidaya”

N	Indikator Sasaran Strategis	Baseline o 2022	2023			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	20.787,93	22.866,73	16.676,16	73%	30.435,61	75%

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2023

Capaian kinerja untuk *jumlah produksi perikanan budidaya* tahun 2023 belum mencapai target, dan jika dilihat kecenderungan setiap tahun jumlah produksi perikanan budidaya dari tahun 2018 hingga akhir tahun 2021 menunjukkan peningkatan setiap tahun namun pada tahun 2022 mengalami penurunan karena adanya bencana banjir pada akhir tahun 2022 yang sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan budidaya Pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali di banding tahun 2022 seperti ditampilkan pada tabel 3.17 dan gambar 3.7 berikut ini.

Tabel. 3.22
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
“Jumlah Produksi Perikanan Budidaya”
Tahun 2019-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun											
			2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	19.400	18.898	97,41	20.370	21.316,90	105	20.788	16.377	79	22.866,73	16.676,16	73

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2023

Tabel. 3.23
Indikator Sasaran Strategis Bidang Perikanan Budidaya

No	Rumusan Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya					
1	Target	20.788	22.866,73	25.153,40	27.668,74	30.435,61
2	Realisasi	16.377	16.676,16	-	-	-

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2023

Adapun permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya adalah:

1. Masih terbatasnya kapasitas para pelaku pembudidaya ikan karena terbatasnya kegiatan pelatihan perikanan budidaya dan kaji banding ke daerah lain serta kurangnya pelatihan di tempat (*on the job training*) dengan mendatangkan narasumber yang sudah berpengalaman.
2. Belum optimalnya pengelolaan Balai Benih Ikan Budidaya yang ada di Kecamatan Sandai dan Manjau karena keterbatasan SDM yang berkualitas di lapangan serta keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya.

3. Sulitnya kondisi infrastruktur antar wilayah dalam melakukan pembinaan perizinan dan monitoring secara berkala kepada kelompok-kelompok usaha pembudidaya ikan.
4. Terjadinya kenaikan BBM yang berdampak kepada tingginya harga akan ikan pabrikan di pasaran mengakibatkan biaya produksi yang semakin besar sehingga berdampak pada produksi perikanan budidaya.
5. Belum terbangunnya komunitas kelompok pembudidaya ikan dan jaringan pemasaran hasil perikanan budidaya dengan baik.
6. Terjadinya bencana banjir akhir Tahun 2022 yang berdampak terhadap jumlah produksi perikanan budidaya.
7. Pada tahun 2023 terdapat kenaikan jumlah produksi perikanan di banding tahun 2022.

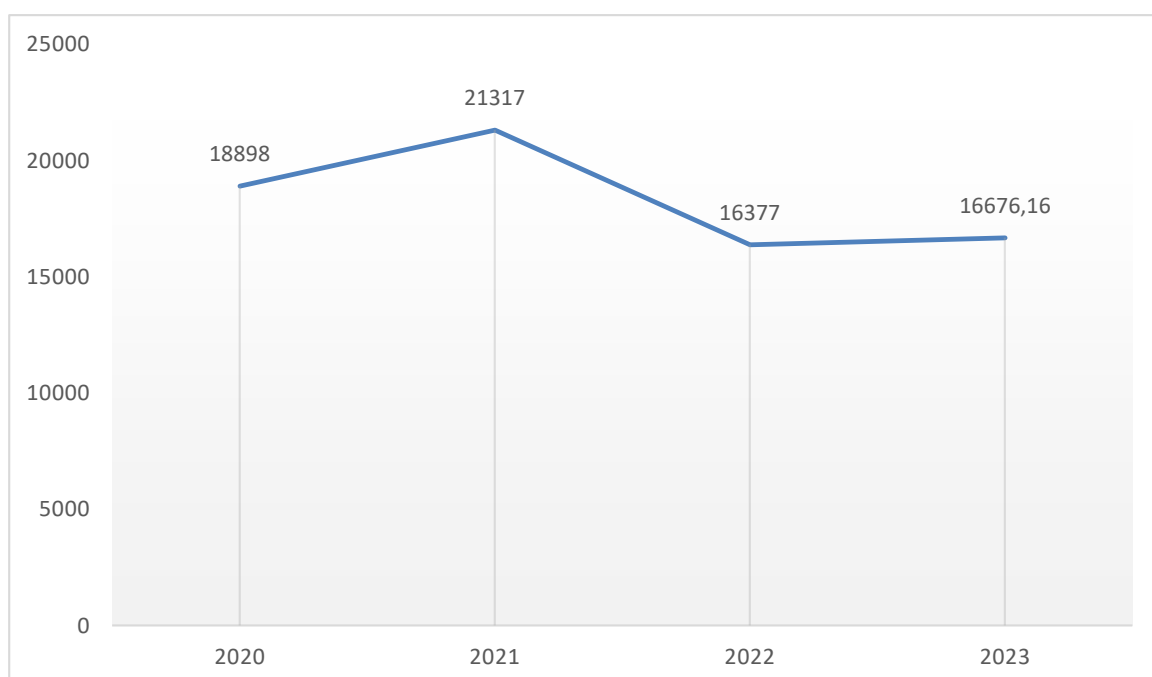
Alternatif/Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan

Produksi Perikanan Budidaya adalah:

1. Memberikan bantuan pakan ikan kepada kelompok serta upaya peningkatan kapasitas kelompok pembudidaya ikan melalui kaji banding sehingga pengetahuan dan minat kelompok untuk usaha membudidayakan ikan semakin meningkat terutama di daerah yang potensial untuk pengembangan perikanan budidaya.
2. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku pembudidaya ikan berupa penyuluhan dan pembinaan usaha perikanan budidaya.
3. Perbaiki sarana dan prasarana Balai Benih Ikan dan pengembangan kapasitas petugas balai benih ikan sehingga dapat menghasilkan bibit/benih ikan unggul yang sangat efektif mendongkrak jumlah produksi perikanan budidaya.
4. Mendorong para pelaku perikanan budidaya untuk membangun jejaring hasil perikanan termasuk fasilitasi pemasaran kepada pihak perusahaan perkebunan.

5. Melaksanakan pelatihan bagi kelompok pembudidaya ikan melalui kerja sama dengan pihak ketiga termasuk kelompok binaan perusahaan yang berminat pada usaha perikanan budidaya.
6. Melaksanakan kegiatan pembelajaran ke kabupaten lain dan kerja sama pengelolaan BBI dengan UPT Kementerian KKP.

Gambar 3.5
Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama
"Jumlah Produksi Perikanan Budidaya" Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2023



Tabel. 3.24
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bidang Perikanan Budidaya dengan Kabupaten tetangga Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Ketapang	Kayong Utara	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	16.676,16	512,90	84.717,32	3.995.742

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2023

Tetapi untuk capaian jumlah produksi perikanan budidaya posisi Kabupaten Ketapang berada di atas Kabupaten Kayong Utara itu dikarenakan luas

wilayah potensi perikanan budidaya Kabupaten Ketapang lebih Luas dibandingkan dengan luas wilayah potensi perikanan budidaya di Kabupaten Kayong Utara dan untuk perbandingan jumlah produksi Provinsi maupun Nasional sudah tentu Kabupaten Ketapang dibawah Provinsi maupun Nasional.

3.2.4 Sasaran ke -4: "Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan"

Tabel. 3.25
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Setiap Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Rumus)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat	Jumlah Hasil Olahan Produk Perikanan yang telah Bersertifikat dibagi dengan jumlah seluruh Produk Olahan Hasil Perikanan x 100%

Sumber data SK Indikator Kinerja Utama 2023

Tabel. 3.26
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Indikator Sasaran	Basline Tahun Ke-n	Tahun n + 1			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2026 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat	NA	11 %	10,23%	93,0%	12%	86%

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat Bidang Perikanan Budidaya Terdapat 1 (satu) Program dan 2 (dua) Kegiatan diantaranya Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, sedangkan kegiatannya meliputi Pembinaan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dan Penyediaan dan

Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan data perhitungan Realisasi Kinerja pada Sasaran 4 dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 3.27 Realisasi Kinerja Capaian Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang

No.	Kelompok / Pelaku Usaha	Jenis Produk	Jenis Sertifikat	Keterangan
1.	“RUSLINA” Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Kauman	- Amplang - Kerupuk	Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	
2.	“BERDIKARI” Jln.PLN. Gg. Rahmat Kelurahan Sukaharja	- Amplang - Kerupuk	Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	
3.	“MEGA BERSAUDARA” Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Kauman	- Amplang - Kerupuk	Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	
4.	“OBIC” / Herlina Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Kauman	- Amplang - Kerupuk	Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	
5.	“SARI BELIDAK” Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Kauman	- Amplang - Kerupuk	Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	
6.	“ALONG” Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Kauman	- Amplang - Kerupuk	Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	
7.	“OBIC 2” / Dalina BTN Gerbang Mutiara Kelurahan Kauman	- Amplang - Kerupuk	Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	
8.	“WARJOK” Jln. Sultan Jalaludin Kelurahan Kauman	- Amplang - Kerupuk	Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	

9.	“USAHA BERSAMA” Jln. Perintis I Desa Baru	- Amplang - Kerupuk	Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	
10.	“DD SHOP” Jln. S.Parman Gg. Melon Kelurahan Sukaharja	- Amplang - Kerupuk	Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	
11.	“CHIKA” Jln. Imam Bonjol Kelurahan Kantor	- Amplang - Kerupuk	Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	
12.	“HS-73 / Jahratun Jln. Pangeran Hidayat Desa Baru	- Amplang - Kerupuk	Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	
13.	“H E R O “ Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Kauman	- Amplang - Kerupuk	Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	
14.	“H E R O 2” Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Kauman	- Amplang - Kerupuk	Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	
15.	“F N” Jln Ahmad Dahlan Kelurahan Kauman	- Amplang - Kerupuk	Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	
16.	“ A Q I L A “ Jln. Wolter Mongonsidi Kelurahan Kauman	- Amplang	Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	

Sumber data Statistik Perikanan 2023

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari target 11% Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat berdasarkan IKU serta dalam pelaksanaan kegiatan dari 40 produk olahan hanya 37 produk olahan yang memiliki sertifikat dari hasil capaian diatas didapat angka sebagai berikut target 0,11 dikali dari hasil pelaksanaan kegiatan didapatkan hasil 10,23 dikali 100% didapatkanlah realisasi sebesar 10,23 % dengan target kinerja 93,0%.

Foto Dokumentasi



Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Kecamatan Nanga Tayap



Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Kecamatan Sungai Melayu



Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Kecamatan Muara Pawan

Tabel. 3.28
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Produksi
Perikanan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat	%	11%	10,23%	93,0%

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2023

Capaian kinerja untuk sasaran ke-4 (empat) **“Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan”** dengan indikator kinerja utama yaitu **“Produk Perikanan yang Bersertifikat”**, pada tahun 2023 belum tersedia karena anggaran untuk mendukung capaian kinerja utama yang ke-4 ini sangat minim sehingga kegiatannya hanya baru berupa biaya pelatihan kepada kelompok usaha olahan perikanan skala mikro dan kecil dan

biaya administrasi kegiatan. Dengan demikian maka capaian kerjanya masih 10,23 % dari target 11%.

Tabel 3.29
Capaian Kinerja
“Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat”
Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Sasaran	Baseline	2023		Target	Capaian s/d	
		2022	Target	Realisasi	% Capaian	AKHIR Renstra	2023 Terhadap Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Produk Perikanan Yang Bersertifikat	8,25	11%	10,23%	93,0%	12%	68,75%

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2023

Dengan capaian kinerja sebesar 10,23% tahun 2023, maka dapat disimpulkan bahwa target produk perikanan yang bersertifikat belum tercapai dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capaiannya baru sebesar 68,75%.

Tabel 3.30
Indikator Sasaran Strategis Bidang Perikanan Budidaya

No	Rumusan Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat					
1	Target	11%	11%	11%	12%	12%
2	Realisasi	8,25%	10,23%	-	-	-

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2023

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Produk Olahan Perikanan yang Bersertifikat adalah :

1. Terbatasnya alokasi anggaran untuk Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sehingga kegiatan dan sub kegiatannya belum dapat dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan yang direncanakan.

2. Belum focusnya rincian belanja kegiatan sesuai tujuannya dalam rangka mencapai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
3. Kurangnya kegiatan pembinaan dan sosialisasi terkait Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan.
4. Terbatasnya bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan bagi kelompok usaha pengolahan ikan.
5. Terbatasnya jumlah peserta untuk mengikuti pelatihan PIRT yang dilaksanakan oleh OPD terkait setiap tahun.
6. Terbatasnya pengetahuan dan wawasan para pelaku usaha pengolahan ikan karena kurangnya kegiatan pembinaan dan pelatihan serta monitoring dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan Produk

Olahan Hasil Perikanan yang Bersertifikat adalah:

1. Meningkatkan dan refocussing anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi semua pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan Skala Mikro dan Kecil sesuai kewenangan kabupaten.
2. Memberikan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan kepada Kelompok-Kelompok Usaha Pengolahan Ikan (UPI).
3. Melakukan Pelatihan dan Pembinaan kepada Kelompok Usaha Pengolahan Perikanan skala Mikro dan Kecil agar meningkat pengetahuan dan kesadarannya sehingga kualitas olahan perikanannya memenuhi ketentuan yang berlaku dan pada akhirnya akan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi karena terjamin kualitasnya.
4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam rangka pelatihan PIRT dan penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) sehingga diperoleh data/informasi yang up to date untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.

5. Melaksanakan pembelajaran ke daerah yang telah maju usaha pengolahan ikannya sesuai ketentuan yang berlaku, agar dapat memberikan wawasan dan motivasi yang tinggi bagi pelaku usaha pengolahan perikanan di Kabupaten Ketapang secara bertahap.

Tabel. 3.31
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Produk Perikanan yang Bersertifikat dengan Kabupaten tetangga
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Ketapang	Kayong Utara	Provinsi
1	Meningkatnya Kualitas Produk Perikanan	Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat	10,23%	-	-

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2023

Untuk Sasaran Perikanan yang Bersertifikat tidak bisa dibandingkan dengan kabupaten tetangga dikarenakan Kabupaten Kayong Utara tidak menggunakannya sebagai Capaian Kinerja sasaran Strategis.

3.3. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dari APBD Kabupaten Ketapang dalam rangka mencapai 5 (lima) sasaran strategis pada tahun anggaran 2023 adalah **Rp. 16.717.654.730,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 14.047.435.476,-** atau **84,03%**.

Adapun rincian realisasi anggaran per sasaran strategis pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.32
Alokasi dan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketersediaan	87,64	83,27	95,01	1.683.396.245,-	1.519.291.604,-	90,25
		Indeks Keterjangkauan	83,43	84,64	101,45			
		Indeks Pemanfaatan	62,44	64,04	102,56			
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	26.648,78	28.139,90	105,60%	3.007.428.238,-	2.617.856.875,-	87,05
3	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	22.866,73	16.676,16	73%	4.316.269.425,-	3.685.323.409,-	85,38
4	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat	11%	10,23%	93,0%	336.888.000,-	332.366.600,-	98,66
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada DKPP	Nilai Reformasi Birokrasi DKPP	17 (C)	***	***	7.373.672.822,-	5.892.596.988,-	79,91

Sumber data Bapanas 2024 dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2023

Selanjutnya dari realisasi anggaran menurut sasaran strategis tersebut di atas, pada tabel berikut ini ditampilkan analisis efisiensi anggaran dengan cara membandingkan antara capaian kinerja sasaran strategis dengan persentase penyerapan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.33
Analisis Efisiensi Anggaran Menurut Sasaran Strategis
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang
Tahun Anggaran 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketersediaan	95,01	90,25	
		Indeks Keterjangkauan	101,45		
		Indeks Pemanfaatan	102,56		
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	105,60%	87,05	18,55
3	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	73%	85,38	
4	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat	93,0%	85,38	
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada DKPP	Nilai Reformasi Birokrasi DKPP	***	***	

Sumber data Bapanas 2024 dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2023

Untuk menentukan *Tingkat Efisiensi* maka digunakan formula yaitu:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \% \text{ capaian kinerja} - \% \text{ penyerapan anggaran}$$

Berdasarkan tabel 3.33 di atas disimpulkan bahwa tingkat efisiensi hanya terdapat pada 1 (satu) sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap” sebesar 18,55%, sementara untuk 4 (empat) sasaran strategis lainnya tidak dapat ditentukan tingkat efisiensinya karena capaian kinerjanya tidak tercapai sebesar 100%, sementara untuk menetapkan adanya efisiensi anggaran adalah apabila kinerja sasaran strategisnya tercapai sesuai yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja dan terdapat sisa anggarannya.

3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi APIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilakukan review dan evaluasi atas implementasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang termasuk LKjIP oleh Inspektorat Kabupaten

Ketapang Tahun 2022 dan diperoleh skor nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah 57,60 atau kategori CC dengan interpretasi CUKUP (Memadai). Adapun hasil tindak lanjut atas rekomendasi APIP (Inspektorat Kabupaten Ketapang) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.34

Daftar Rekomendasi APIP atas Evaluasi dan Review LKjIP Tahun sebelumnya serta Tindak Lanjut Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi
1	Agar melakukan publikasi dokumen perencanaan secara tepat waktu setiap 1 bulan setelah dokumen disahkan dengan mengunggah pada website resmi perangkat daerah	Memerintahkan pengelola website untuk mengupload dokumen perencanaan dimaksud tepat waktu
2	Agar dokumen perencanaan yang dibuat diformalkan secara lengkap dengan membubuhkan tanda tangan kepala perangkat daerah dan stempel perangkat daerah	Memerintahkan operator agar terlebih dahulu mengecek dokumen sebelum diupload
3	Melakukan penyesuaian target kinerja pada dokumen perencanaan dengan memperhatikan kemampuan penganggaran dan keuangan daerah	Melakukan rapat internal membahas prioritas agar selaras dengan kemampuan keuangan daerah
4	Memastikan kualitas dan kecukupan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) terutama pada kriteria spesifik, relevansi dan terukur	Indikator Kinerja telah ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala perangkat daerah berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor

5	Melaksanakan review dan perbaikan untuk memastikan kualitas cascading (penjenjangan) kinerja dari tingkat tertinggi hingga terendah dapat berorientasi outcome (hasil) sesuai dengan tingkatannya dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien	Akan melakukan review dan perbaikan untuk memastikan kualitas cascading
6	Memperkuat target kinerja agar lebih menantang dan dapat dicapai dengan melakukan inovasi	Mengadakan sosialisai dan pelatihan agar dapat memacu kreativitas dan inovasi
7	Perlu adanya penguatan terhadap pemahaman dan kepedulian setiap pegawai terhadap kinerja yang ingin dicapai dengan melakukan rapat kerja secara rutin serta pemberian reward dan punishment kepada pegawai	Mengadakan pelatihan kantor sendiri (PKS) dan pemilihan pegawai teladan per semester serta pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan
8	Menyusun SOP pengumpulan data kinerja	SOP pengumpulan data kinerja belum ada, namun pengumpulan data kinerja dilakukan secara konvensional/manual dari masing-masing unit kerja (sekretariat dan Bidang-Bidang)
9	Melakukan survey internal terkait pemahaman dan kepedulian pegawai terhadap pencapaian kinerja organisasi	Akan melakukan survey internal terkait pemahaman dan kepedulian pegawai
10	Melakukan penyesuaian anggaran yang lebih efisien untuk mencapai target kinerja perangkat daerah	Sudah dilaksanakan dengan menggeser kegiatan yang tidak bisa terlaksana pada perubahan anggaran

11	Memanfaatkan analisa atas pencapaian target kinerja sebelumnya untuk menentukan target kinerja selanjutnya. Hal ini bertujuan agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria relevant dan achievable serta dapat menjadi sasaran dan masukan pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya	dengan membuat laporan realisasi fisik dan keuangan sehingga dapat melihat pos-pos mana yang dianggap tidak atau sudahnya mencapai target yang ditentukan sehingga dapat menjadi gambaran dalam perencanaan kinerja berikutnya
12	Mengembangkan sistem informasi pengelolaan manajemen kinerja terintegrasi antara organisasi dan individu secara berjenjang dari tingkat tertinggi hingga terendah dan memanfatkannya dalam proses pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala	dengan membuat perjanjian kinerja untuk para pejabat eselon dan SKP untuk Staf
13	Perlu adanya penguatan terhadap pemahaman dan kepedulian setiap pegawai terhadap kinerja yang ingin dicapai dengan melakukan rapat kerja secara rutin serta pemberian reward dan punishment kepada pegawai	Mengadakan pemilihan pegawai teladan per semester
14	Melakukan publikasi dokumen laporan kinerja dengan menggunakan dokumen laporan kinerja secara berkala di situs resmi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan guna menjadi akses bagi masyarakat untuk mengetahui informasi terkait pencapaian kinerja Perangkat Daerah	Mengupload Renstra, Renja, LKJIP dan lain-lain pada Website DKPP dengan alamat www.dkpp.ketapangkab.go
15	Mendorong seluruh unit organisasi untuk melakukan pengumpulan data kinerja secara berkala. Pengumpulan data kinerja ini meliputi informasi tentang rekam jejak yang telah dilakukan, progres pencapaian target kinerja, faktor penghambat dan penunjang upaya dan tindak lanjut yang dilakukan kedepan	dengan menyusun rencana aksi dan evaluasi rencana aksi

16	Mendorong agar informasi yang ada pada dokumen laporan kinerja tahunan dan berkala dapat dimanfaatkan dalam penyesuaian aktivitas dan penganggaran dalam upaya memaksimalkan pencapaian kinerja serta menjadi kepedulian seluruh unsur di dalam organisasi, sehingga berimplikasi kepada budaya organisasi	memerintakan kepada seluruh bidang yang ada di DKPP agar menghubungi operator website DKPP agar mengupload kegiatan bidang baik berupa kegiatan fisik maupun berupa informasi
17	Melampirkan bukti dukung tindak lanjut rekomendasi LHE tahun sebelumnya ke dalam LKJIP	akan melampirkan bukti eviden tindak lanjut rekomendasi LHE
18	Mencantumkan nilai evaluasi implementasi SAKIP dalam LKJIP pada bagian BAB III	nilai evaluasi implementasi SAKIP sudah terdapat pada LKJIP 2022 pada halaman 66
19	Memperbaiki nama jabatan sesuai dengan jabatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Memerintahkan operator agar terlebih dahulu mengecek dokumen sebelum di upload
20	Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 96 tahun 2022	akan di bentuk tim evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 96 tahun 2022
21	Membuat lembar kertas kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (sasaran strategis) sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 96 tahun 2022	Sudah dibuat lembar kertas kerja evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Perbup Ketapang Nomor 96 tahun 2022
22	Mendorong seluruh unit organisasi agar berkontribusi nyata atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 96 tahun 2022	Setiap bidang pada DKPP sudah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal berjenjang
23	Menyusun jadwal terkait Evaluasi Akuntabilitas Internal yang dilakukan setiap triwulan sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 96 tahun 2022	Penyusunan jadwal terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan
24	Menyusun SOP Evaluasi Akuntabilitas Internal sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 96 tahun 2022	Belum disusun SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Sumber data LKE Inspektorat 2023

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini merupakan wujud pertanggungjawaban capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Capaian kinerja dari 5 (lima) sasaran strategis, dengan 7 (tujuh) indikator kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks ketersediaan pangan, capaian kinerjanya adalah 84,22 dari target sebesar 87,64 atau 96,09%.
- 2) Indeks keterjangkauan pangan, capaian kinerjanya adalah 83,30 dari target sebesar 83,43 atau 99,84%.
- 3) Indeks Pemanfaatan Pangan, capaian kinerjanya adalah 60,38 dari target sebesar 62,44 atau 96,70%.
- 4) Jumlah produksi perikanan tangkap, capaian kinerjanya adalah sebesar 28.139,90 ton dari target 26.648,75 ton atau 105,60%.
- 5) Jumlah produksi perikanan budidaya, capaian kinerjanya adalah 16.676,16 ton dari target sebesar 22.866,73 ton atau 73%.
- 6) Persentase Produk Perikanan yang bersertifikat, capaian kinerjanya adalah 10,23% dari target 11% atau 93,0%.
- 7) Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Sudah tidak dilakukan penilaian.

Alokasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023, sebesar **Rp.16.717.654.730,-** (sudah termasuk Gaji dan Tunjangan serta Honorarium Tenaga Non PNS) dengan realisasi sebesar **Rp.14.047.435.476,-** atau **84,03%**.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian sasaran strategis adalah:

- 1) Perencanaan yang baik sesuai program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas dengan mempertimbangkan dampak dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana perikanan walaupun masih belum memadai sesuai dengan perkembangan kebutuhan di lapangan;
- 3) Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati.
- 4) Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas walaupun masih belum memadai sesuai kebutuhan.

Namun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang ketahanan pangan dan perikanan dalam rangka mencapai sasaran strategis antara lain:

1. Anggaran dalam rangka mencapai indikator sasaran strategis **“Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan”** Tahun 2023 masih belum memadai melalui Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sehingga capaian kinerja masih rendah dan upaya pembinaan dan monitoring untuk mendorong kelompok usaha pengolahan perikanan melaksanakan sertifikasi produk olahannya belum terlaksana dengan baik.
2. Penyediaan kebutuhan sarana prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya masih terbatas sementara kebutuhan kelompok usaha perikanan masih sangat sangat tinggi/banyak.
3. Dikarenakan Kemenpan RB telah mengeluarkan peraturan terbaru terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik maka Pelaksanaan penilaian Reformasi Birokrasi pada Dinas Ketahanan dan Perikanan sudah tidak dilakukan pada tahun 2023.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis pada masa mendatang, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas perencanaan kegiatan, fokus pada program dan kegiatan prioritas terutama dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama (IKU) DKPP periode Tahun 2021-2026 serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan ketepatan waktu pelaksanaan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
2. Pembenahan internal organisasi secara terus menerus melalui aksi-aksi perubahan serta berupaya meningkatkan kapasitas dan disiplin aparatur akan tanggungjawabnya masing-masing serta melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan hingga akhir masa periode Renstra yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

I

PERJANJIAN KINERJA

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG
SEBELUM APBD PERUBAHAN DAN
SETELAH APBD PERUBAHAN TAHUN
2023**



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan Jend. Sudirman No. 15 Ketapang, Kode Pos : 78813
Telp. (0534) 32753 Faks. (0534) 32753
E-mail : diskppketapang@gmail.com Website : <http://dkpp.ketapangkab.go.id/>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs.Heryandi,M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Martin Rantan, S.H., M.Sos**

Jabatan : **Bupati Kabupaten Ketapang**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Martin Rantan, S.H., M.Sos

Ketapang, 12 Januari 2023

Pihak Pertama,

Drs.Heryandi,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19711023 199101 1 001

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	17 Angka
2.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketersediaan Pangan	87,64 Angka
3.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	26648,78 Ton
4.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Keterjangkauan	83,43 Angka
5.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	22866,73 Ton
6.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Pemanfaatan	62,44 Angka
7.	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan Yang Bersertifikat	11 Persen
	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6.457.452.930	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Rp. 344.500.000	
3.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp. 507.754.450	
4.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp. 315.815.000	
5.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp. 50.000.000	
6.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp. 1.870.428.238	
7.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp. 3.966.269.425	
8.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp. -	
9.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp. 336.888.000	

Ketapang, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,
Bupati Kabupaten Ketapang

Martin Bantan, S.H., M.Sos

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang

Drs. Heryandi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711023 199101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan Jend. Sudirman No. 15 Ketapang Kode Pos 78813
Telp : (0534) 32753, Fax (0534) 32753
e-mail : dkpp@ketapangkab.go.id website : www.dkpp.ketapangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. Adi Mulia, M.Hut**
Jabatan : **Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MARTIN RANTAN, S.H, M.Sos**
Jabatan : **Bupati Ketapang**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Martin Rantan, S.H., M.Sos

Ketapang, 21 November 2023
Pihak Pertama,

Ir. Adi Mulia, M.Hut
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 199203 1 012

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	17 Angka
2.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketersediaan Pangan	87,64 Angka
3.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	26648,78 Ton
4.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Keterjangkauan	83,43 Angka
5.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	22866,73 Ton
6.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Pemanfaatan	62,44 Angka
7.	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan Yang Bersertifikat	11 Persen
	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7.373.672.822	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rp. 344.500.000	
3.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp. 828.854.250	
4.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp. 315.815.000	
5.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp. 194.226.995	
6.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp. 3.007.428.238	
7.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp. 4.316.269.425	
8.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
9.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp. 336.888.000	

Pihak Kedua,
Bupati Kabupaten Ketapang

Martin Rantan, S.H., M.Sos

Ketapang, 21 November 2023
Pihak Pertama,

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang

Ir. Adi Mula, M.Hut
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 199203 1 012